

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kecurangan atau *fraud* merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan atau *fraud* merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. Penyimpangan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. *Statement of Auditing Standart* dalam Norbarani (2012) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. Salah saji material dalam laporan keuangan akan menyesatkan *stakeholder* atau pengguna laporan keuangan karena informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Dalam lingkup entitas pemerintahan, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah melalui laporan keuangan dengan membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Masyarakat atau pihak yang berkepentingan lainnya juga dapat menilai tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya. Selain sebagai alat komunikasi kepada publik, laporan keuangan juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik mengenai kinerja dari entitas publik. Pertanggungjawaban kepada publik harus dilakukan secara transparan. Jika dalam laporan keuangan mengandung *fraud*,

maka pemerintah di nilai tidak memenuhi fungsi utamanya berkaitan dengan kepentingan publik.

Jenis laporan keuangan yang disajikan dalam entitas pemerintahan sedikit berbeda dengan laporan keuangan yang disajikan dalam entitas swasta. Dalam instansi pemerintah laporan keuangan yang disajikan antara lain adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Santoso & Pambeleum, 2008). Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik antara lain adalah kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*), akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and restrospective reporting*), perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*), kelangsungan organisasi (*viability*), hubungan masyarakat (*public relation*) dan sumber fakta dan gambaran (*source of fact and figures*) (Mardiasmo, 2009).

Laporan keuangan dalam entitas pemerintahan sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik. Untuk itu, seharusnya laporan

keuangan disajikan secara wajar dan tidak mengandung unsur kecurangan atau *fraud*. Kecurangan atau *fraud* bisa saja dilakukan oleh manajer sampai pegawai. Jenis *fraud* yang paling sering terjadi dalam entitas pemerintahan adalah korupsi (Sukanto, 2007). Secara skematis *Association of Certified Examiners* (ACFE) menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. Pohon ini menggambarkan cabang-cabang dari *fraud* dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. *Occupational fraud tree* ini mempunyai 3 cabang utama yakni *Asset Misappropriation* (Penyalahgunaan Aset), *fraudulent statement* (Kecurangan Laporan Keuangan), dan *Corruption* (Korupsi).

*Asset Misappropriation* meliputi penyalahgunaan atau pencurian *asset* atau harta perusahaan atau pihak lain. *Asset misappropriation* merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur atau dihitung (*defined value*). *Fraud* jenis ini juga merupakan jenis *fraud* yang frekuensi terjadinya paling sering dan biasanya dilakukan oleh pegawai yang kurang memiliki pengaruh atau wewenang dalam organisasi. *Fraudulent statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*. *Corruption* (Korupsi) merupakan jenis *fraud* yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap

dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak yang terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan (Christofel, 2010).

Korupsi merupakan jenis *fraud* yang sering dilakukan oleh seseorang dengan jabatan atau wewenang yang tinggi pada suatu perusahaan. Frekuensi *fraud* jenis ini lebih jarang dibandingkan dengan *asset missappropriation* akan tetapi lebih merugikan perusahaan dikarenakan nominalnya yang relatif lebih tinggi. Menurut Goolsarran (dalam Kurniawan, 2009), korupsi menyebabkan sejumlah dampak terhadap perekonomian dimana: (1) barang dan jasa menjadi lebih banyak memakan biaya sehingga merugikan kualitas dan standar hidup masyarakat; (2) perdagangan yang terdistorsi karena preferensi lebih diberikan kepada barang dan jasa yang dapat menawarkan tingkat penyuapan yang tinggi; (3) akumulasi tingkat hutang publik jangka panjang yang tinggi akibat dari kecenderungan pemerintahan yang korup untuk memakai dana pinjaman luar negeri dalam membiayai proyek-proyek yang padat modal; serta (4) terjadinya *missalokasi* sumberdaya yang langka dan tidak diperhatikannya sejumlah daerah yang membutuhkan prioritas pembangunan akibat pejabat yang korup lebih mementingkan daerah lain yang dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan pribadi untuk dirinya.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri,

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menjelaskan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang yang merupakan bentuk lain dari korupsi.

Motivasi seseorang melakukan *fraud* relatif bermacam-macam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang melakukan *fraud* adalah *fraud triangle theory*. *Fraud triangle* terdiri atas tiga komponen yaitu *opportunity* (kesempatan), *pressure* (tekanan), dan *rationalization* (rasionalisasi). Kesempatan atau *opportunity* merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang bisa melakukan kecurangan. Kondisi tersebut sebenarnya dapat dikendalikan oleh perusahaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kondisi tersebut dalam lingkup entitas pemerintahan antara lain keefektifan sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, kesesuaian, kompensasi komitmen organisasi dan budaya etis organisasi.

Keefektifan pengendalian internal penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan atau instansi (Adi, dkk. 2016). Ketidakefektifan pengendalian internal akan dapat membuka kesempatan bagi pegawai untuk melakukan tindakan yang menyimpang atau *fraud* karena pegawai akan memanfaatkan ketidakefektifan pengendalian internal itu sebagai suatu titik lemah perusahaan untuk melakukan *fraud*. Faktor lain yang menyebabkan maraknya tindakan kecurangan akuntansi di Indonesia adalah ketaatan aturan akuntansi. Suatu instansi atau lembaga akan melakukan tindakan kecurangan karena tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku (Hasanudin dan Pangayow, 2016).

Kondisi asimetri informasi dapat membuka peluang bagi pegawai untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya (Adi, dkk. 2016). Asimetri informasi dapat diminimalkan dengan pemberian *reward* berupa kompensasi kepada pegawai. Tekanan paling sering datang dari adanya tekanan kebutuhan keuangan. Kebutuhan ini seringkali dianggap kebutuhan yang tidak dapat dibagi dengan orang lain untuk bersama-sama menyelesaikannya sehingga harus di selesaikan secara tersembunyi dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya kecurangan. Kesesuaian kompensasi dibutuhkan agar individu dapat merasa tercukupi dan diharapkan dapat mengurangi keinginan untuk melakukan kecurangan (Mustika, dkk. 2016).

Komitmen organisasi mengarahkan individu melakukan berbagai tindakan. Oleh sebab itu diperlukan adanya komitmen organisasi yang tinggi untuk meminimalkan kecurangan yang terjadi dalam suatu instansi

(Kurrohman dan Widyayanti, 2018). Karena komitmen organisasi dari pegawai dapat meminimalkan kecenderungan perilaku menyimpang. Budaya organisasi yang kuat akan memicu karyawan untuk berfikir, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Sehingga, semakin kuat budaya etis organisasi, semakin sedikit kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh karyawan (Kiswanto, dkk. 2017).

Beberapa penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda-beda di dalam pengaruh keefektifan sistem pengendalian, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi dan budaya etis organisasi terhadap *fraud* akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin dan Pangayow (2016), Indriastuti, dkk. (2016), Kiswanto, dkk. (2017) serta Kurrohman dan Widyayanti (2018) menunjukkan bahwa keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi, sedangkan penelitian dari Mustika, dkk. (2016) dan Permatasari, dkk. (2017) menunjukkan hal yang berbeda, keefektifan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin dan Pangayow (2016), Mustika, dkk. (2016), serta Kiswanto, dkk. (2017) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi. Adapun hasil lain ditunjukkan penelitian dari Indriastuti, dkk. (2016) yaitu, ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Indriastuti, dkk. (2016), dan Adi, dkk. (2016) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi. Berbeda

dengan yang ditunjukkan oleh Mustika, dkk. (2016) dan Permatasari, dkk. (2017) yang menyatakan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi.

Kemudian hasil penelitian dari Indriastuti, dkk. (2016) dan Kurrohman dan Widyayanti, (2018) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi. Sedangkan penelitian dari Hasanudin dan Pangayow (2016), Adi, dkk. (2016), Permatasari, dkk. (2017) serta Kiswanto, dkk. (2017) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi, dkk. (2016) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi, dan hasil berbeda ditunjukkan oleh Kurrohman dan Widyayanti (2018) bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi. Selanjutnya adalah penelitian dari Permatasari, dkk. (2017) menyatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi. Hal berbeda diungkapkan oleh Adi, dkk. (2016), Kiswanto, dkk. (2017) serta Kurrohman dan Widyayanti (2018) yang menyatakan bahwa budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi.

Penelitian ini merupakan *confirmatory research* (menguji kembali) faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh pada *fraud* akuntansi dengan mereplikasi dari penelitian sebelumnya yaitu mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kurrohman dan Widyayanti (2018), adapun perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada variabel independen dengan mengganti variabel gaya kepemimpinan dan penegakan peraturan dengan menambahkan



variabel ketaatan aturan akuntansi dan asimetri informasi, kemudian obyek penelitian menggunakan dimensi waktu dan tempat berbeda, yaitu SKPD Kabupaten Sukoharjo dan berdasarkan perbedaan hasil penelitian (*research gap*) sebelumnya, adapun judul penelitian ini adalah “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi di Sektor Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo)**”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi?
2. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi?
3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi?
4. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi?
6. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini digunakan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal terhadap *fraud* akuntansi.

2. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap *fraud* akuntansi.
3. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap *fraud* akuntansi.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* akuntansi.
5. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap *fraud* akuntansi.
6. Untuk mengetahui pengaruh budaya etis organisasi terhadap (*fraud* akuntansi).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi menambah wawasan, pengetahuan dan tambahan informasi, khususnya tentang *fraud* akuntansi dan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi instansi terkait dalam melakukan strategi pengelolaan pegawai yang tepat agar tidak terjadi *fraud*. Kemudian sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi masyarakat.

## **E. Sistematika Penulisan**

Merupakan tata urutan pengujian penelitian ini dan dimaksudkan untuk mempermudah penyusunan penelitian. Adapun sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan kerangka berpikir, sampai dengan konsep hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan alat analisis data yang digunakan.

### **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Merupakan hasil dan pembahasan berisi inti dari penulisan skripsi, yaitu analisis dan pembahasannya.

### **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti setelah melakukan analisis pembahasan.